

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi dan pembahasan yang telah dikemukakan sehubungan dengan Telaah Kerangka Kerja Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Koto Boru sudah berjalan dengan optimal. Secara umum pelaksanaan penyaluran BLT-DD baik dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan, yang dilakukan oleh aparat desa juga telah berjalan dengan baik, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Penerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan telah kehilangan pekerjaan, belum terdata, serta memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, sesuai dengan sasaran. Meskipun masih terdapat kendala, namun hal tersebut masih dapat diatasi oleh perangkat desa, seperti melakukan musyawarah bersama untuk mengambil keputusan yang baik.
2. Sistem Pengendalian Internal terhadap pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Boru belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa kendala, antara lain kurangnya anggaran BLT yang menyebabkan penerima BLT merasa tidak puas dengan jumlah anggaran yang mereka terima, dan masih adanya masyarakat di desa Koto Boru yang belum terdata sebagai

penerima BLT, di mana masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdata sebagai penerima. Perlu adanya pembinaan dari pihak pengawas kepada para aparat yang masih kurang pemahaman terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Terjadi perubahan data nama-nama penerima bantuan BLT dana desa dikarenakan ketidaksesuaian antara kriteria dan daftar penerima bantuan tersebut pada tahun 2020-2022. Hal inilah yang menyebabkan Kerangka Pengendalian Intern pada Program BLT-DD di Kelurahan Koto Boru belum ideal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas mengenai sistem pengendalian dalam administrasi program pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, penulis akan memberikan beberapa saran:

1. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Boru dalam mengalahkan faktor penghambat dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa, yaitu dengan menentukan dan mengkonfirmasi informasi penerima bantuan langsung tunai dana desa secara konsisten dan perencanaan dengan mengalihkan pengumpulan dana desa ke pilihan bantuan langsung tunai dan non tunai.
2. Pemerintah Daerah seharusnya lebih fokus pada kondisi individu yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), tetapi mereka termasuk di antara orang-orang yang terkena dampak kemiskinan, sehingga mereka dapat memberikan lebih banyak dana untuk setiap desa, sehingga pemerintah desa dapat mengalokasikannya secara ideal ke daerah setempat dalam kondisi pemulihan keuangan.
3. Pemerintah desa harus memberikan data yang jelas dengan melakukan sosialisasi langsung ke daerah setempat mengenai bantuan yang berbeda sehingga masyarakat setempat mengerti dengan jelas bantuan apa yang mereka dapatkan.

4. Saat periode baru, pimpinan perlu untuk lebih teliti lagi dalam merekrut pegawai atau aparat yang nantinya akan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas di instansi tersebut dan tentunya bidang yang sesuai dengan posisi yang akan ditempati agar sistem pengendalian internal di Desa Koto Baru bisa lebih optimal lagi dilaksanakan.

